



## PENERIMAAN NEGARA

# Manipulasi Data Migas Rugikan Rp 153 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan adanya kerugian penerimaan negara senilai Rp 153,4 triliun. Hal ini disebabkan adanya manipulasi data produksi minyak dan gas siap jual dalam periode setahun.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, di Jakarta, Selasa (8/4), mengatakan, 90 persen perusahaan minyak dan gas bumi (migas) membuat dua laporan berbeda tentang produksi siap jualnya (*lifting*). Data *lifting* dalam laporan untuk perusahaan induk lebih besar daripada data dalam laporan untuk Pemerintah Indonesia. "Akibatnya, penerimaan negara dirugikan sebesar Rp 153,4 triliun dalam setahun," kata Bambang.

Di samping itu, ia melanjutkan, KPK juga telah memetakan persoalan di sektor usaha mineral dan batubara. Selanjutnya, KPK akan mempresentasikan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Dari situ ada agenda aksi untuk dirumuskan. Apa yang mesti dieksekusi KPK dan DJP," kata Bambang. Menurut dia, penerimaan negara menjadi salah satu prioritas pengawasan KPK. Sektor pertambangan adalah salah satunya.

Di samping itu, Bambang melanjutkan, KPK bersama DJP dan Kementerian Keuangan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan traktat pajak (*tax treaty*). Persoalan yang telah selesai dilakukan adalah dengan otoritas Belanda. "Ini sudah selesai. Kita mau coba wilayah lain," kata

Bambang.

Darussalam dari Danny Darussalam Tax Center berpendapat, ada dua mekanisme untuk menindaklanjuti temuan itu. Pertama adalah DJP memeriksa data tersebut. Jika hasilnya menyebutkan adanya kurang bayar, DJP menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk menagihnya.

Pilihan kedua adalah DJP melakukan pemeriksaan atas bukti permulaan tersebut. Kemudian, DJP melakukan penyidikan pajak. Jika hasilnya positif, kasus dibawa ke pidana. "Idealnya, sesuai tujuan pajak, adalah pilihan pertama, DJP menagih kekurangan pajak. Pidana adalah pilihan terakhir," kata dia.

Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany, beberapa waktu lalu, mengatakan, DJP masih lemah dalam basis data. Untuk sektor pertambangan, perminyakan, dan perkebunan, misalnya, DJP tidak memiliki data pembanding. "Selama ini, pajak yang disetorkan sepenuhnya didasarkan pada data yang diberikan wajib pajak. Ini rawan penyelewengan, baik dari wajib pajak maupun petugas pajak sendiri," ujar Fuad.

Ego sektoral di antara kementerian dan lembaga negara, menurut Fuad, menjadi salah satu penyebabnya. DJP sulit mengakses data potensi pajak sektoral di kementerian terkait.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Realisasinya tahun 2013 adalah Rp 916,29 triliun atau 92 persen dari target. Migas menyumbang Rp 88,74 triliun di antaranya. Sementara penerimaan migas tahun 2012 senilai Rp 83,41 triliun. (LAS/ICH)



**BPK RI**  
**Perwakilan**  
**Provinsi Riau**

Nama Media  
Hari/ Tanggal  
Halaman/ Kolom  
Wilayah/ Kode  
Tema

:Kompas  
:Rabu/9 April 2014  
:19/1-2  
:Jakarta/ Lainnya  
:Penerimaan Negara : Manipulasi Data  
Migas Rugikan Rp 153 Triliun

---